

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PERUMDA BPR BANK PASAR KABUPATEN
TEMANGGUNG
TAHUN 2021**



**Jl. Letjend Suprpto No. 32 Temanggung
TELEPON: 0293491814**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Dengan meningkatnya skala usaha, tingginya persaingan dan makin meningkatnya risiko bisnis yang dihadapi BPR, maka Perumda BPR Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola perusahaan yang baik. Dengan penerapan Tata Kelola BPR yang baik, Perumda BPR Bank Pasar mampu bertahan dan mampu menghadapi tantangan di masa pemulihan atas dampak pandemi Covid-19 yang menekan dunia usaha termasuk usaha Perbankan.

Perumda BPR Bank Pasar Temanggung berusaha secara konsisten menjaga integritas seluruh jajaran organisasi untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik, yaitu Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Akuntability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness) dalam seluruh aktivitas usaha BPR

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar Tata Kelola yang baik diharapkan BPR dapat terus mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif, sekaligus sebagai upaya menjaga kepercayaan stakeholders. Dalam hal masih terdapat penerapan yang belum maksimal, Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung berupaya terus memperbaiki penerapannya secara bertahap dan konsisten.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	RETNO NENDRA WIARTY
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; 2. mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai peraturan dan berdasar prinsip kehati-hatian 3. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi pejabat audit intern, OJK maupun otoritas lainnya 4. merealisasikan Rencana Kerja dan anggaran dasar Bank, serta 5. melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh jenjang organisasi 6. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berkelanjutan		
2.	Nama	:	ESTI WIBOWO
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Bersama dengan Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati- hatian sesuai tanggung jawab dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris untuk mempertahankan peran peran bendahara dalam pelaksanaan gaji bruto ASN, meningkatkan proporsi penyaluran dana kepada kredit UMKM, mengurus dan melaksanakan pemindahan kantor kas Wonoboyo dan Candioto ke kompleks kantor kecamatan, menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan BPR termasuk pelaksanaan undian tabungan yang dilaksanakan secara virtual, dan terus memantau tingkat kesehatan BPR; melaksanakan pemantauan dan pelatihan penerapan APU PPT; dan memantau kondisi tingkat kesehatan BPR serta memenuhi ketentuan POJK restrukturisasi sebagai stimulus dampak Covid-19			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	KRISTRI WIDODO
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Komisaris atau Ketua Dewan Pengawas memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan organisasi, 2. melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 3. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR		

	4. memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi pejabat audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK maupun otoritas lainnya 5. melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris; dan 6. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal		
2.	Nama	:	IWAN SISWANTO
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Bersama dengan Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas memastikan terselenggarannya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan organisasi, melakukan pengawasan, arahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
1 Persetujuan atas Rencana Bisnis dan rencana bisnis perubahan BPR, 2 persetujuan dan pertimbangan rotasi, mutasi dan kebijakan terkait kepegawaian 3 bersama dengan Komisaris atau Dewan Pengawas mengupayakan mempertahankan peran bendahara dalam pelaksanaan gaji bruto ASN 4 BPR untuk meningkatkan proporsi penyaluran dana kepada kredit UMKM 5 melaksanakan pemindahan kantor kas Wonoboyo dan Candirotto ke kompleks kantor kecamatan, 6 menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan BPR termasuk pelaksanaan undian tabungan yang dilaksanakan secara virtual, 7 merekomendasikan Dieksi untuk melakukan pemantauan dan pelatihan penerapan APU PPT; 8 bersama dengan Dewan Pengawas atau komisaris memantau kondisi tingkat kesehatan BPR serta memenuhi ketentuan POJK restrukturisasi sebagai stimulus dampak Covid-19			
Penjelasan Lebih Lanjut :			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR tidak memiliki Komite karena modal inti masih dibawah Rp 80 milyar	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	BPR belum memiliki komite karena modal inti belum mencapai Rp.80 milyar		

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR belum memiliki komite karena modal inti belum mencapai Rp 80 milyar			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	RETNO NENDRA WIARTY	Rp0,00	0%
2.	ESTI WIBOWO	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi tidak memiliki saham pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	RETNO NENDRA WIARTY			
2.	ESTI WIBOWO			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RETNO NENDRA WIARTY	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ESTI WIBOWO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RETNO NENDRA WIARTY	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ESTI WIBOWO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain pada BPR				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	KRISTRI WIDODO	Rp0,00	0%
2.	IWAN SISWANTO	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	KRISTRI WIDODO			
2.	IWAN SISWANTO			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	KRISTRI WIDODO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	IWAN SISWANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota dewan komisaris maupun dengan pemegang saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	KRISTRI WIDODO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	IWAN SISWANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
anggota Dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota dewan Komisaris , maupun dengan Pemegang Saham				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp559.228.284,00	2	Rp393.772.356,00
2.	Tunjangan	2	Rp1.251.630.576,00	2	Rp59.065.848,00
3.	Tantiem	2	Rp275.179.469,00	2	Rp63.216.905,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp978.972.235,00	0	Rp120.939.105,00
Total			Rp3.065.010.564,00		Rp636.994.214,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	mobil Toyota Innova (1), mobil Toyota Rush (1)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
fasilitas perumahan dan asuransi kesehatan diberikan dalam bentuk tunjangan/ remunerasi yng diterima bersama dengan gaji			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	8.6 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.27 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4.63 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4.58 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji dimaksud merupakan gaji pokok dan tunjangan yang diterima selama 1 tahun, tidak termasuk penerimaan lain	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	15 Maret 2021	10	Rapat Evaluasi Laporan Tahunan 2020, rencana pembangunan dan pemanfaatan gedung kantor kas Candirotto dan kantor kas Wonoboyo dikomplek kantor kecamatan, serta evaluasi penyaluran gaji bruto untuk nasabah ASN yang terkendala kebijakan yang menguntungkan Bank Jateng.
2.	08 Juni 2021	10	Evaluasi kinerja semester I tahun 2021, pembahasan RBB perubahan, pembahasan lanjutan penyaluran gaji bruto ASN dan rencana pelaksanaan undian tabungan tahun 2021
3.	19 Juli 2021	9	Evaluasi kondisi perusahaan dalam masa pemberlakuan PPKM di Kabupaten Temanggung dan pembahasan langkah-langkah mengatasi permasalahan penerapan gaji bruto dengan Bank Jateng
4.	23 November 2021	14	Rapat evaluasi triwulan III membahas capaian kinerja triwulan III serta kendala yang dihadapi BPR terutama berkaitan dengan masa pandemi Covid yang belum berakhir.
5.	24 November 2021	10	Pembahasan Rencana Bisnis Bank tahun 2022
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Materi rapat Dewan Komisaris tahun 2021 didominasi evaluasi kinerja BPR berkaitan dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung, dan rapat pembahasan gaji bruto untuk ASN yang mengakibatkan BPR mengalami kendala pemotongan angsuran kredit pegawai ASN			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	KRISTRI WIDODO	5	0	100%
2.	IWAN SISWANTO	4	0	80%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Ketua Dewan Komisaris menghadiri keseluruhan rapat Dewan Komisaris, sedangkan Anggota Dewan Pengawas menghadiri 80% rapat				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
tidak terjadi penyimpangan internal								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
tidak terdapat permasalahan hukum baik dalam proses penyelesaian maupun berkekuatan hukum tetap yang dihadapi BPR selama periode laporan		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	18 Maret 2021	Sosial	pembelian bibit tanaman konservasi lahan	BAPPEDA Kabupaten Temanggung	Rp3.000.000,00
2.	07 Mei 2021	Sosial	penyaluran dana bantuan berupa pembagian 200 buah paket sembako	masyarakat ekonomi lemah sekitar BPR terdampak Covid-19	Rp40.000.000,00
3.	28 Mei 2021	Sosial	bantuan kegiatan sosialisasi dan edukasi pengobatan dengan obat tradisional sederhana untuk mengurangi penggunaan obat kimia dan pengobatan dengan metode akupresure, serta bantuan pembuatan dan teknik pemanfaatan kebun tanaman obat keluarga	tim kerja kegiatan inovasi Dinas Kesehatan Kab Temanggung	Rp7.500.000,00
4.	22 Juni 2021	Sosial	Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) untuk ibu MUKINI warga desa Klaseman Wonoboyo Temanggung	ibu MUKINI	Rp15.000.000,00
5.	22 Juni 2021	Sosial	pemberian bantuan untuk 9 kepala keluarga korban bencana kebakaran di Desa Bonjor Kec Tretep Temanggung	Korban Bencana Kebakaran Desa Bonjor	Rp50.000.000,00

6.	03 Juli 2021	Sosial	Bantuan pengadaan 100 paket kaos dan topi untuk petugas pemulasaran jenazah korban Covid-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Temanggung	BPBD Kab Temanggung	Rp12.000.000,00
7.	09 Agustus 2021	Sosial	pemberian 200 paket sembako untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19 kab Temanggung melalui Forkom BUMD Kab Temanggung	masyarakat terdampak Covid-19	Rp40.000.000,00
8.	30 Agustus 2021	Sosial	Bantuan proyek pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan melalui proyek desa wisata (pelatihan, pembuatan video promosi, pembelian tenda umkm kuliner) di kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung	Dinpermades Kb Temanggung	Rp35.630.000,00
9.	30 Agustus 2021	Sosial	dukungan pelaksanaan eksebisi PON XX untuk atlit dan manajer tim olahraga Triathlon Provinsi Jawa Tengah di Papua (salah satu atlit adalah atlit muda kab Temanggung)	manajer tim Federasi Triathlon Indonesia	Rp10.000.000,00
10.	02 September 2021	Sosial	bantuan 50 buah kaos untuk tenaga tracer Covid-19 Senkom mitra Polri Polres Temanggung	unit samsa Satbinmas Polres Temanggung	Rp4.000.000,00
11.	24 September 2022	Sosial	bantuan sosial 25 paket sembako untuk masyarakat prasejahtera desa Ngipik dan Soropadan Kec Pringsurat Temanggung	masyarakat prasejahtera desa Ngipik dan Soropadan Pringsurat Temanggung	Rp5.080.000,00
12.	13 Oktober 2021	Sosial	bantuan pengadaan sarana tambang untuk tim penanggulangan bencana alam Garda Relawan Indoneisa	Garda Relawan Indonesia	Rp1.500.000,00
13.	04 November 2021	Sosial	bantuan 100 buah kaos untuk kegiatan Temanggung Bebas Sampah	Panitia hari Pahlawan dan hari jadi Kab Temanggung	Rp8.500.000,00
14.	26 November 2021	Sosial	Tali asih untuk atlit	Sdr Slamet Wahyu	Rp10.000.000,00

			penyandang disabilitas berprestasi peraih 3 medali emas dan 1 medali perak Pekan Paralympian Nasional (Perpanas) XVI di Papua an Slamet Wahyu Jati	Jati	
15.	08 Desember 2021	Sosial	bantuan kegiatan Diklat Taruna Tani KTNA kecamatan Tretep Temanggung	Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kec Tretep Temanggung	Rp5.000.000,00
16.	22 Desember 2021	Sosial	Bantuan sosial untuk korban bencana alam letusan Gunung Semeru Lumajang Jawa timur melalui Bagian Kesra Setda Temanggung	Bagian Kesra Setda Temanggung	Rp2.000.000,00
17.	28 Desember 2021	Sosial	bantuan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui pembentukan Desa Wisata	desa Batursari Kledung Temanggung	Rp5.000.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian dana BPR untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi & pengembangan UMKM diberikan melalui dana CSR Bank, dan BPR tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PERUMDA BPR BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jl. Letjend Suprpto No. 32 Temanggung

Nomor Telepon : 0293491814

Posisi Laporan : Desember 2021

Modal Inti : Rp49.574.635.540,00

Total Aset : Rp470.814.344.235,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PERUMDA BPR BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.1 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.76	0.352
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.92	0.288
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.1	0.21
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.35	0.235
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.3	0.23
7	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2	0.15
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
9	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.46	0.246
10	Rencana Bisnis BPR	2.17	0.163
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.05	0.154
Nilai Komposit			2.1
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.76)

Jumlah Direksi telah memenuhi ketentuan yaitu 2 orang, tidak memiliki hubungan dengan sesama Direksi atau Dewan Komisaris, keduanya berdomisili di kota yang sama dengan domisili kantor pusat BPR, telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.92)

Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai ketentuan yaitu 2 orang sesuai jumlah anggota Direksi, telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, tidak memiliki hubungan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan Direksi, dan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengawasan BPR dengan cukup baik

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR belum berkewajiban menunjuk Komite karena modal inti masih dibawah Rp 50 milyar

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.1)

BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian Benturan Kepentingan namun masih perlu disempurnakan, dan tidak terdapat transaksi di BPR yang mengandung benturan kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.35)

Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani kegiatan operasional, memastikan BPR telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya. Pejabat Eksekutif telah melakukan penyempurnaan dan pengkinian kebijakan dan prosedur namun belum maksimal. BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional namun masih merangkap jabatan sebagai Kepala Bagian Umum.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.3)

BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan pedoman audit intern pada seluruh aspek yang secara langsung mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Pengawas dan Laporan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK sesuai ketentuan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah melaksanakan penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara KAP dengan OJK. KAP yang ditunjuk oleh BPR telah terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS (KPM) berdasarkan usulan Dewan Pengawas/ komisaris. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan kepada BPR secara tepat waktu, dan telah disampaikan oleh BPR kepada OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.46)

BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko, dan telah memiliki kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko namun masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan serta dilengkapi dengan ketentuan tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada aktivitas baru sesuai

ketentuan. BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan menerapkan manajemen risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan OJK.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait BMPK dan telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit, serta tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK pada periode laporan.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.17)

BPR telah menyusun rencana bisnis sesuai visi dan misi BPR yang menggambarkan rencana strategis BPR dan rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK, dan telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.05)

BPR telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan publikasi, laporan tahunan dan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dengan tata cara, jenis, cakupan dan materi sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK. Laporan publikasi dan laporan tahunan telah ditandatangani oleh paling sedikit 1 orang anggota Direksi dengan nama jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan dipublikasikan sesuai ketentuan OJK

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis atas seluruh kriteria Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR dapat disimpulkan bahwa BPR telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik, senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. BPR telah memenuhi sebagian besar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara cukup memadai. Struktur Tata Kelola BPR cukup memadai, proses pada sebagian besar faktor cukup efektif dan hasil penerapan tata kelola dari keseluruhan faktor sudah cukup baik. Namun demikian masih terdapat faktor-faktor penerapan tata kelola yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki dimasa yang akan datang.

Temanggung, 20 April 2022

PERUMDA BPR BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Menyetujui



RETNO NENDRA WIARTY, SE, MM.

Direktur Utama yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si

Ketua Dewan Pengawas